

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Teori Keagenan

Menurut Jensen dan Meckling, (1976) dalam teori agensi yang mereka perkenalkan menyatakan bahwa diantara pihak-pihak yang berkepentingan, pemilik, pengelola, disaat perusahaan publik melakukan pemisahan antara keduanya, terdapat asimetri yang memungkinkan terjadinya penyelewengan atau kecurangan yang dilakukan oleh agent. Hal ini disebabkan oleh faktor umum yang menjadi pokok masalah dalam kejadian ini disebabkan oleh perbedaan kepentingan antara *principal* dan *agent*. Posisi prinsipal bertujuan melaksanakan tugasnya dengan sebaik mungkin, sedangkan agent bertujuan untuk meningkatkan standar hidup diri dan keluarganya.

Lestari & Handayani, (2020) teori keagenan menjelaskan tentang dua pelaku ekonomi yang saling bertentangan yakni prinsipal dan agen. Teori keagenan merupakan suatu kontrak dimana satu atau lebih orang (*principal*) memerintah orang lain (*agent*) untuk melakukan suatu jasa atas nama prinsipal serta memberi wewenang kepada agen membuat keputusan yang terbaik bagi prinsipal. Teori keagenan telah dipraktekkan pada organisasi sektor publik khususnya pada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang bertujuan untuk memberikan pelayanan secara maksimal kepada masyarakat atas sumber daya yang digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan berkaitan dengan praktek pelaporan kinerja yang didasari oleh teori keagenan.

2.2 Kinerja Pemerintah Daerah

Dalam organisasi pemerintah daerah kinerja merupakan hasil kerja yang telah dicapai oleh seseorang atau suatu kelompok organisasi berdasarkan wewenang dan tanggungjawab masing-masing dalam rangka mencapai suatu tujuan organisasi yang bersangkutan dan tidak melanggar hukum serta sesuai dengan moral dan etika yang ada dalam PP No.29 Tahun 2014 menyatakan bahwa kinerja

merupakan hasil dari program atau kegiatan yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas serta kualitas yang terukur.

Pemerintah daerah merupakan suatu badan penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut atas otonomi dan tugas pemerintah daerah adalah membantu dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

2.3 Akuntabilitas

Akuntabilitas manajerial menuntut lembaga publik untuk melakukan pengelolaan organisasi secara efektif dan efisien. Setiap proses dalam organisasi harus dipertanggungjawabkan untuk menghindari ketidakefektifan organisasi. Akuntabilitas program berkaitan dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak, dan apakah organisasi telah mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil optimal dengan biaya yang seminimal mungkin. Akuntabilitas kebijakan terkait dengan pertanggungjawaban lembaga publik atas kebijakan-kebijakan yang diambil. Akuntabilitas keuangan berkaitan dengan pertanggungjawaban lembaga publik untuk menggunakan uang publik secara ekonomi, efisien dan efektif, tidak ada pemborosan dan kebocoran dana serta korupsi.

Penelitian Purnama & Nadirsyah, (2016) menemukan bahwa akuntabilitas berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah. Hasil ini didukung dengan penelitian W. E. Putra, (2018) yang menemukan bahwa akuntabilitas publik berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah. Saputra et al., (2014) juga menemukan bahwa Akuntabilitas berpengaruh terhadap kinerja SKPD Aceh Selatan. Kinerja SKPD diharapkan dapat meningkat dengan adanya akuntabilitas publik yang tinggi dari setiap kegiatan aparatur pada semua tingkatan SKPD. Dengan adanya akuntabilitas publik, pemerintah daerah bisa memberikan

pertanggungjawaban atas semua kegiatan yang dilaksanakan sehingga kinerja pemerintah daerah dapat dinilai baik oleh pihak internal, maupun pihak eksternal. Hal ini menegaskan pentingnya akuntabilitas publik dalam peningkatan kinerja SKPD.

2.4 Transparansi

Menurut Mardiasmo, (2009), transparansi merupakan keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi. Keterbukaan informasi dalam kegiatan pemerintah merupakan salah satu wujud komitmen pemerintah dalam melaksanakan prinsip tata kelola yang baik sehingga menciptakan pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Transparansi merupakan kondisi adanya keterbukaan secara penuh, juga merupakan salah satu penopang akuntabilitas Mahsun, (2006).

Transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa Masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumberdaya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan Ningrum, (2010). Dalam hal pelaksanaan tranparansi pemerintah, media massa mempunyai peranan yang penting baik sebagai sebuah kesempatan untuk berkomunikasi pada publik Mupun menjelaskan berbagai informasi yang relevan

2.5 Budaya Organisasi

Robbins & Judge, (2013) menyatakan bahwa budaya organisasi cenderung membentuk standar kerja yang tinggi diantara para anggotanya, sehingga jika suatu budaya itu kuat dan mendukung standar kerja yang tinggi maka kinerja karyawan pun akan meningkat.

Menurut Mangkunegara, (2010), menyatakan bahwa budaya organisasi adalah seperangkat asumsi atau sistem keyakinan, nilai-nilai dan norma yang

dikembangkan dalam organisasi yang dijadikan pedoman tingkah laku bagi anggota-anggotanya untuk mengatasi masalah adaptasi eksternal dan internal. Dengan adanya organisasi yang sukses memiliki budaya yang kuat sehingga dapat menarik, memelihara dan mengimbali orang yang berhasil melaksanakan peranannya dalam mencapai tujuan.

Penelitian yang dilakukan oleh Wati, (2013), menyatakan bahwa Budaya Organisasi merupakan seperangkat asumsi dasar dan keyakinan yang dianut oleh anggota-anggota organisasi yang kemudian digunakan untuk mengatasi masalah internal maupun eksternal organisasi. Budaya Organisasi dikatakan kuat adalah budaya yang hampir semua manajer menganut bersama seperangkat nilai dan metode menjalankan bisnis yang relative konsisten.

2.6 Pengendalian Internal

Secara umum Pengendalian internal adalah penggunaan semua sumber daya organisasi untuk meningkatkan, mengarahkan, mengendalikan, dan mengawasi berbagai aktivitas dengan tujuan untuk memastikan bahwa tujuan perusahaan tercapai. Menurut Mulyadi, (2013) Pengendalian Internal yakni mencakup struktur organisasi, metode dan ukuran yang dikoordinasikan guna menjaga dan melestarikan kekayaan organisasi, mengecek ketelitian serta keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan dipatuhinya kebijakan. Dengan adanya tujuan tersebut sistem pengendalian internal merupakan alat untuk mengontrol kegiatan yang dilakukan pegawai agar tidak berdampak pada organisasi pemerintahan agar terjadi pemborosan dan penggunaan sumber daya yang tidak efektif dan efisien. Pengendalian internal dirancang untuk memberi suatu keyakinan akan tercapainya tujuan. Keberhasilan suatu sistem pengendalian internal ditentukan oleh seberapa jauh sistem pengendalian yang digunakan dengan karakteristik organisasi.

2.7 Penelitian Terdahulu

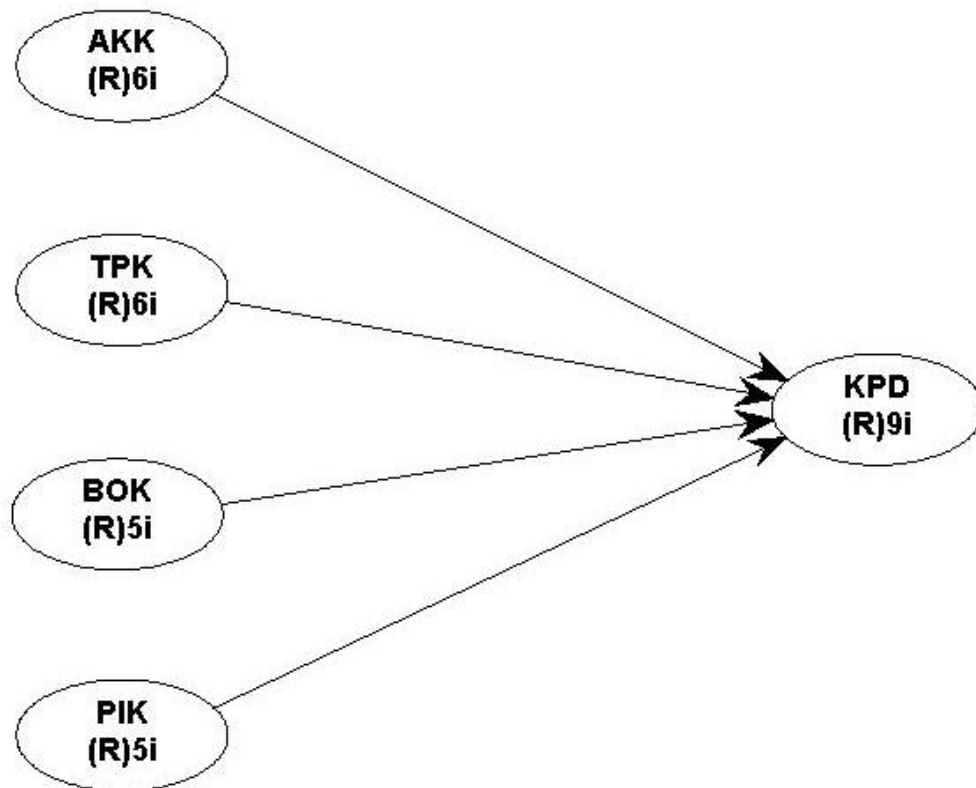
Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Judul Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian
1	Jatmiko, (2020) Pengaruh Pengawasan Internal, Akuntabilitas dan Transparansi Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman	Independen : 1. Pengawasan Internal 2. Akuntabilitas 3. Transparansi Dependen : Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman	Variabel Pengawasan internal berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah. Sedangkan Variabel Akuntabilitas berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah. Sedangkan Variabel Transparansi berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah.
2	Putri, (2021) Pengaruh Transparansi, Budaya Organisasi dan Akuntabilitas Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah	Independen : 1. Transparansi 2. Budaya Organisasi 3. Akuntabilitas Dependen : Kinerja Pemerintah Daerah	Variabel Transparansi Berpengaruh terhadap Kinerja Pemerintah, dan variabel lain yang tidak termasuk dalam model regresi tersebut.
3	(Mustika <i>et al</i> , (2023) Pengaruh Kesesuaian Kompensasi dan Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Pegawai	Independen : 1. Pengaruh Kesesuaian Kompensasi 2. Budaya Organisasi Dependen : Kinerja Pegawai	Variabel Kompensasi, dan Budaya Organisasi Berpengaruh terhadap Kinerja Pegawai
4	Mete, (2020) Pengaruh Pengawasan Fungsional, Transparansi Publik, dan Akuntabilitas	Independen : 1. Pengaruh Pengawasan Fungsional	Variabel Pengawasan Fungsional dan Transparansi Publik tidak berpengaruh terhadap kinerja

	Publik Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah	<p>2. Transparansi Publik</p> <p>3. Akuntabilitas Publik</p> <p>Deependen : Kinerja Pemerintah Daerah</p>	pemerintah daerah, sedangkan Variabel Akuntabilitas Publik berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah.
5	Putra and Indraswarawati (2021) Pengaruh Pengawasan Keuangan Daerah, Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah dan Akuntabilitas Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Klungkung	<p>Independen :</p> <p>1. Pengawasan Keuangan Daerah</p> <p>2. Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah</p> <p>3. Akuntabilitas</p> <p>Dependen : Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Klungkung</p>	Variabel Transparansi Pengelolaan Daerah Berpengaruh terhadap Kinerja Pemerintah Daerah, sedangkan Variabel Akuntabilitas berpengaruh terhadap kinerja Pemerintah Daerah.
6	Kiri & Handayani, (2021) Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi Publik Serta Fungsi Pemeriksaan Intern Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah	<p>Independen :</p> <p>1. Akuntabilitas</p> <p>2. Transparansi Publik</p> <p>3. Fungsi Pemeriksaan Intern</p> <p>Dependen : Kinerja Pemerintah Daerah</p>	Variabel Transparansi Publik ini tidak berpengaruh terhadap Kinerja Pemerintah Daerah, Sedangkan Variabel Akuntabilitas Publik dan Pemeriksaan Intern berpengaruh terhadap Kinerja Pemerintah Daerah.
7	Umam & Setiyowati (2023) Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Komitmen Aparatur, Kepatuhan Pada Regulasi Terhadap Kinerja Aparatur Daerah	<p>Independen :</p> <p>1. Akuntabilitas</p> <p>2. Transparansi</p> <p>3. Komitmen Aparatur</p> <p>4. Kepatuhan Pada Regulasi</p> <p>Dependen :</p>	Variabel Akuntabilitas, Transparansi, dan Komitmen Organisasi berpengaruh terhadap Kinerja Perangkat Daerah, Sedangkan Variabel Kepatuhan terhadap regulasi tidak berpengaruh

		Kinerja Daerah	Aparatur	terhadap Pemerintah Daerah.	Kinerja Daerah.
--	--	----------------	----------	-----------------------------	-----------------

2.8 Kerangka Pemikiran



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

2.9 Hasil Hipotesis

2.9.1 Pengaruh Akuntabilitas Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah

Akuntabilitas manajerial menuntut lembaga publik untuk melakukan pengelolaan organisasi secara efektif dan efisien. Setiap proses dalam organisasi harus dipertanggungjawabkan untuk menghindari ketidakefektifan organisasi. Akuntabilitas program berkaitan dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak, dan apakah organisasi telah mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil optimal dengan biaya yang seminimal mungkin. Akuntabilitas kebijakan terkait dengan pertanggungjawaban lembaga publik atas kebijakan-kebijakan yang diambil. Akuntabilitas keuangan berkaitan dengan pertanggungjawaban lembaga publik

untuk menggunakan uang publik secara ekonomi, efisien dan efektif, tidak ada pemborosan dan kebocoran dana serta korupsi. Dengan adanya akuntabilitas publik, pemerintah daerah bisa memberikan pertanggungjawaban atas semua kegiatan yang dilaksanakan sehingga kinerja pemerintah daerah dapat dinilai baik oleh pihak internal, maupun pihak eksternal.

Berdasarkan teori agensi, akuntabilitas merupakan kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk mempertanggungjawabkan segala kegiatannya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang mempunyai hak dan wewenang untuk meminta, menyajikan, menginformasikan, dan menyebarluaskan akuntabilitas tersebut.

Penelitian Purnama & Nadirsyah, (2016) menemukan bahwa akuntabilitas berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah. Hasil ini didukung dengan penelitian Putra, (2018) yang menemukan bahwa akuntabilitas publik berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah. Saputra, Darwanis, Abdullah, et al., (2014) juga menemukan bahwa Akuntabilitas berpengaruh terhadap kinerja SKPD Aceh Selatan. Kinerja SKPD diharapkan dapat meningkat dengan adanya akuntabilitas publik yang tinggi dari setiap kegiatan aparatur pada semua tingkatan SKPD. Dengan adanya akuntabilitas publik, pemerintah daerah bisa memberikan pertanggungjawaban atas semua kegiatan yang dilaksanakan sehingga kinerja pemerintah daerah dapat dinilai baik oleh pihak internal, maupun pihak eksternal. Hal ini menegaskan pentingnya akuntabilitas publik dalam peningkatan kinerja SKPD. Berdasarkan temuan penelitian tersebut maka hipotesis penelitian ini adalah sebagai berikut :

H1 : Akuntabilitas berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah.

2.9.2 Pengaruh Transparansi Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah

Tujuan dari transparansi yaitu memberikan penjelasan bagaimana pertanggungjawaban yang akan dilaksanakan, metode apa yang akan dipakai untuk melaksanakan tugas, bagaimana pelaksanaannya dan apa dampaknya. Dalam transparansi penyelenggaraan pemerintahan, masyarakat diberikan kesempatan untuk mengetahui kebijakan yang akan atau telah diambil oleh pemerintah, dengan

itu dapat memberikan *feedback* atau *outcomes* terhadap kebijakan yang telah diambil oleh pemerintah. Dengan demikian, masyarakat dapat mengetahui secara jelas dan tanpa ada yang ditutup-tutupi terkait proses perumusan kebijakan publik dan implementasinya.

Berdasarkan teori agensi, teori agensi menjelaskan terkait dengan hubungan antara *agent* dan *principal*. *Agent* dalam melaksanakan kinerjanya dapat dipengaruhi oleh *principal*, dengan adanya transparansi dapat meningkatkan kinerja organisasi karena transparansi dalam pengelolaan pemerintah dapat menekankan kepada pemerintah untuk terbuka akan hak-hak masyarakat dalam menerima informasi yang akurat dan jujur mengenai kebijakan dan program pemerintah.

Penelitian tentang pengaruh transparansi terhadap kinerja pemerintah sudah dilakukan oleh Jatmiko, (2020); Krisherdian, (2015); dan Saputra, Darwanis, Abdullah, et al., (2014) hasil penelitian menunjukkan bahwa transparansi berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah. Maka hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H2 : Transparansi berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah.

2.9.3 Pengaruh Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah

Budaya organisasi merupakan seperangkat asumsi atau sistem keyakinan, nilai-nilai dan norma yang dikembangkan dalam organisasi yang dijadikan pedoman tingkah laku bagi anggota-anggotanya untuk mengatasi masalah adaptasi eksternal dan internal. Dengan adanya organisasi yang sukses memiliki budaya yang kuat sehingga dapat peranannya dalam mencapai tujuan.

Berdasarkan teori agensi dengan adanya budaya kerja yang baik dalam organisasi pikiran atau ide seluruh kinerja dapat disamakan dan disatukan dalam suatu visi dan misi yang kemudian memunculkan suatu aktivitas yang bermanfaat dalam mengembangkan dan memajukan pelayanan, sehingga jika suatu budaya itu kuat dan mendukung standar kerja yang tinggi maka kinerja pemerintah pun akan meningkat.

Budaya Organisasi Etis dalam sisi internal pegawai akan memberikan sugesti kepada semua perilaku yang diusulkan oleh pemerintah agar dapat dikerjakan, penyelesaian yang sukses dan dampaknya akan memberikan keuntungan kepada pegawai itu sendiri dengan memiliki kepercayaan pada diri sendiri, kemandirian dan mengagumi diri sendiri. Dari sifat ini dapat meningkatkan harapan pegawai agar kinerjanya semakin meningkat Putri, (2021). Penelitian tentang pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja pemerintah sudah banyak dilakukan (Atarwaman, 2015; Kurniawan, 2013; dan Prayoga, 2017) hasil penelitian menunjukkan bahwa budaya organisasi berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah. Maka hasil hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H3 : Budaya organisasi berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah.

2.9.4 Pengaruh Pengendalian Internal Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah

Salah satu penyebab suatu organisasi dapat menjalankan rencana untuk mencapai tujuannya ialah sistem pengendalian intern karena dalam mencapainya tujuan dibutuhkannya sistem pengendalian terhadap kinerja yang teratur dan tertata terutama didalam lingkungan organisasi. Menurut Mulyadi, (2013) Pengendalian Internal yakni mencakup struktur organisasi, metode dan ukuran yang dikoordinasikan guna menjaga dan melestarikan kekayaan organisasi, mengecek ketelitian serta keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan dipatuhinya kebijakan.

Teori agensi dan pengendalian internal memiliki hubungan yang erat karena teori agensi membahas tentang hubungan keagenan antara pemilik (*principal*) dan manajemen (*agent*) yang memiliki *preferensi* atau tujuan yang berbeda, teori agensi dapat membantu dalam merancang sistem pengendalian internal yang efektif untuk mengurangi risiko kecurangan dan memastikan bahwa tujuan organisasi tercapai.

Hal tersebut juga di dukung oleh Safiri & Zulkarnain, (2021) bahwa sistem pengendalian internal dirancang untuk mengontrol, mengawasi dan mengarahkan organisasi agar bisa mencapai suatu tujuan. Dengan itu juga menurut Rahayu & Prabowo, (2018) menyatakan bahwa semakin baik sistem pengendalian intern maka akan semakin baik juga kualitas kinerja pegawai yang dihasilkan. Berdasarkan peneliti terdahulu yang diteliti oleh Susanto, (2018) bahwa sistem pengendalian intern terhadap kinerja pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pemerintah. Dengan adanya sistem pengendalian intern pada kinerja pemerintah terutama pada OPD badan pemerintah dapat mempermudah serta melacarkan jalan menuju target yang ingin dicapai oleh pemerintah, dengan meningkatkan kinerja pemerintah yang terkendali serta terarah maka kinerja di suatu organisasi itu dikatakan efektifitas. Berdasarkan kajian teori dan telaah penelitian sebelumnya maka hipotesis penelitian ini adalah:

H4 : Pengendalian Internal berpengaruh terhadap Kinerja Pemerintah Daerah.